frontier

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei Penilaian Integritas

Hasil Survei Penilaian Integritas
WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I.Y

Tahun 2022

Dipersiapkan untuk Pemerintah Daerah :
Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I.Yogyakarta

https://www.kpk.go.id

PIC Cluster 2:
(Putri) 0813 4812 4064

Jalan Kuningan Persada Kav 4
Setiabudi – Kuningan, Jakarta Selatan

@official.kpk

PERPI SPSS AMA AMERICAN MARKETING ASSOCIATION ESOMAR

Bab 01.

Pendahuluan

Perjalanan SPI

Survei Penilaian Integritas

2007

SPI

pertama kali dilakukan dengan nama Survei Integritas

2019

127

KLPD dilakukan ujicoba pelaksanaan SPI secara massif (survei tatap muka)

2020

online

SPI dilaksanakan secara terbatas Sebagai ujicoba

2021

250

Ribu Responden

Pelaksanaan SPI online secara massif di 634 KLPD (baseline)

2022

392

Ribu Responden

Pelaksanaan SPI online secara massif di 636 KLPD

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Tujuan Survei dan Kelompok Responden

Survei Penilaian Integritas

Tujuan survei

Memetakan **risiko dan praktik korupsi** di seluruh lembaga publik meliputi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk menjadi **cerminan kondisi integritas di Indonesia.**

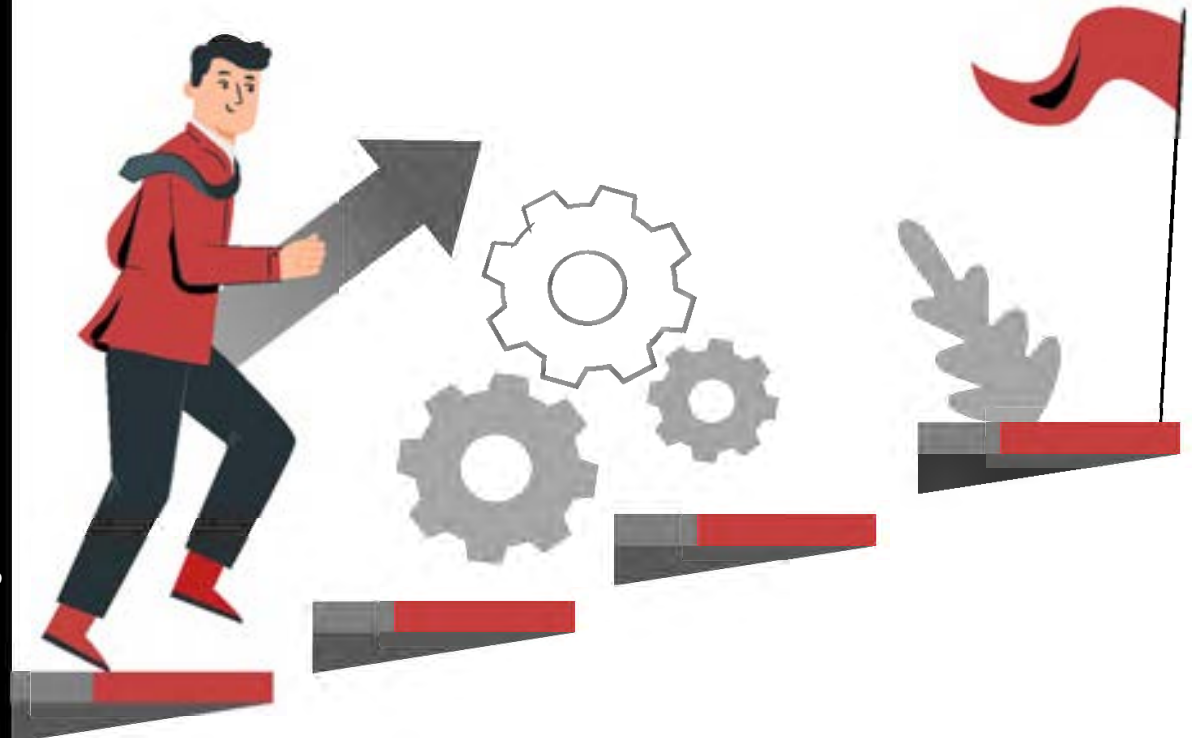

Internal

Eksternal

Eksper

Kelompok responden

Responden berasal dari:

Internal KLPD (pegawai ASN dan Non ASN),
Eksternal KLPD (pengguna layanan, masyarakat, pengusaha, dll)
Eksper/ahli/stakeholder (BPK, BPKP, Ombudsman, Jurnalis, dll).

Keunggulan SPI

01 Kombinaasi **Persepsi, Pengalaman**, dan **Data Objektif** (faktor koreksi).

02 **Fokus** pada hal-hal terkait **pemberantasan korupsi**.

03 Responden terdiri dari sudut pandang **Internal** (Pegawai) dan **Eksternal** (Masyarakat/ Vendor/ Ahli) dari KLPD

04 Hasil SPI berisikan **rekomendasi** perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

05 Laporan SPI disampaikan secara **transparan** melalui JAGA.id.

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Instansi yang Terlibat

Survei Penilaian Integritas

631 INSTANSI

Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah terlibat dalam Survei Penilaian Integritas

94
Kementerian Lembaga

34
Pemerintah Provinsi

503
Pemerintah Kabupaten/Kota

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Responden yang Terlibat

Survei Penilaian Integritas

392.785 TOTAL RESPONDEN

Terlibat dalam Survei Penilaian Integritas

222.470

INTERNAL

Pegawai ASN maupun Non ASN

162.155

EKSTERNAL

Masyarakat umum pengguna layanan dan vendor pengadaan

8.160

EKSPER

Narasumber ahli dari BPK, BPKP, Ombudsman, LSM, Jurnalis, dll

Keterangan :
Dari 407.108 data responden yang masuk. 14.323 jawaban responden tidak dianalisis karena distribusi jawaban abnormal yang tersebar di 120 K/L/PD dan 29.987 responden tidak *eligible*.

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indikator Pengukuran Dampak

Survei Penilaian Integritas

- 8 Menu MCP
- Sosialisasi
- STRANAS PK
- Reformasi Birokrasi
- ZI, WBK, WBBM
- Audit & TLHP BPK

Instansi

Individu

Survei Penilaian Integritas

IPAK

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Fokus pada Fenomena Korupsi

Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas

Suap & Gratifikasi

Conflict of Interest

Pengadaan Barang dan Jasa

Nepotisme (Jual Beli Jabatan)

Penyalahgunaan Anggaran

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemanfaatan Hasil

13%

Bobot **SPI** dalam penilaian **PMPRB**

panrb

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Sejak tahun 2021 SPI menjadi salah satu indikator dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Kementerian PPN/ Bappenas

72

Target Indeks **SPI** di tahun **2022**

Sejak tahun 2020 SPI telah masuk dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional dan salah satu Program Prioritas Nasional

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Tindak Lanjut SPI

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

8 Maret 2022

Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 07 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUATAN INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM AREA RAWAN KORUPSI

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, ditemukan adanya berbagai risiko korupsi di seluruh instansi pemerintah[1]. Risiko tersebut antara lain berupa: penerimaan gratifikasi/suap, intervensi atau perdagangan pengaruh (*trading in influence*), korupsi

[1] Nilai SPI secara rinci dapat dilihat di: **laga.id/jendela-pencegahan** pada menu: Survey Penilaian Integritas

- Sejak 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan KPK mengeluarkan **Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penguatan Aparatur Sipil Negara Dalam Area Rawan Korupsi** dan surat KPK No B/ 333 /LIT.05/10-15/01/2022 tanggal 31 Januari 2022.
- Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan penanggung jawab wilayah dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dalam **menyusun rencana aksi** dan kaitannya dengan menu *Monitoring Center for Prevention* (MCP) atau unit relevan KPK lainnya untuk mempertajam rencana aksi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Tindak Lanjut Hasil (Wajib)

Survei Penilaian Integritas

SPI 2021

Indonesia **masih rentan korupsi**. Korupsi masih menjadi tantangan kita bersama dalam dekade mendatang.

SPI 2022

Upaya perbaikan atau tindak lanjut hasil survei dilakukan oleh KLPD dalam bentuk kegiatan **Program Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI (PATUH)**

57 KLPD

menindaklanjuti hasil SPI 2021

Semua K/L/PD peserta dapat menindaklanjuti rekomendasi **perbaikan hasil SPI 2022 di tahun 2023** dan menyampaikan upaya dan hasilnya pada pemangku kepentingan terkait.

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Bab 02.

Hasil Survei 2022

INDONESIA RENTAN KORUPSI

Survei Penilaian Integritas

INDEKS INTEGRITAS NASIONAL INDONESIA

71.9 -0.5

0 — 45.0 — 88.0 — 100

Indeks Terendah
Kab. Waropen

Indeks Tertinggi
Kab. Boyolali

0.00 – 67.9	Sangat Rentan
68.00 – 73.60	Rentan
73.77 – 77.40	Waspada
77.50 - 100	TerJAGA

Kategori indeks integritas, dimana :

00.00-67.90	:	Sangat Rentan	73.70-77.40	:	Waspada
68.00-73.60	:	Rentan	77.50-100.00	:	TerJAGA

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. COPYRIGHT© 2022 KPK RI

Positioning SPI

Survei Penilaian Integritas

INDIVIDU

Korupsi, pengetahuan dan perilaku

ORGANISASI

Survei Penilaian Integritas

Korupsi dan Sistem Antikorupsi

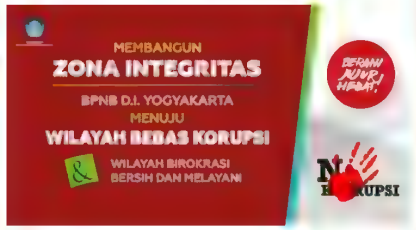

Reformasi Birokrasi, layanan publik dan korupsi

REGIONAL

Korupsi, Sistem Integritas Daerah

NEGARA

Korupsi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Perbandingan Trend CPI dan SPI

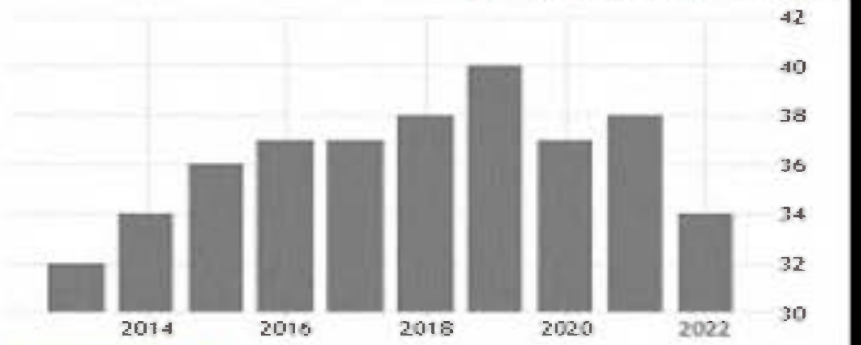

Penurunan Indeks

Survei Penilaian Integritas

71.9

Rentan

Penurunan Indeks

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas Nasional Indonesia

Survei Penilaian Integritas

Indeks Integritas Nasional Indonesia

-0.5

71.9

45.0 — Indeks Terendah Kab. Waropen

88.0 — Indeks Tertinggi Kab. Boyolali

0 — 100

INDEKS INTEGRITAS PER KRITERIA

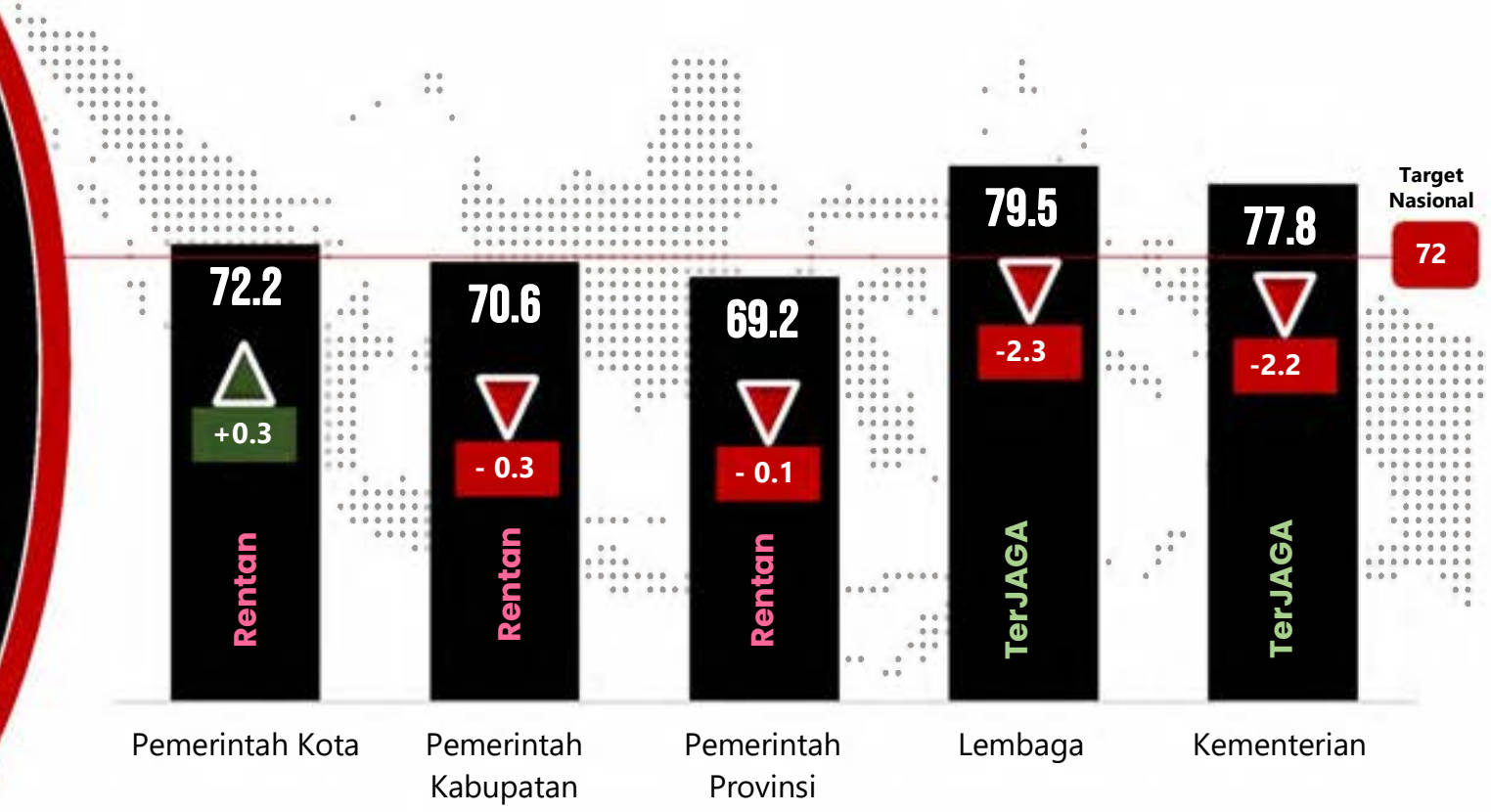

Kategori indeks integritas, dimana :

00.00-67.90	: Sangat Rentan	73.70-77.40	: Waspada
68.00-73.60	: Rentan	77.50-100.00	: TerJAGA

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas Per Wilayah

Survei Penilaian Integritas

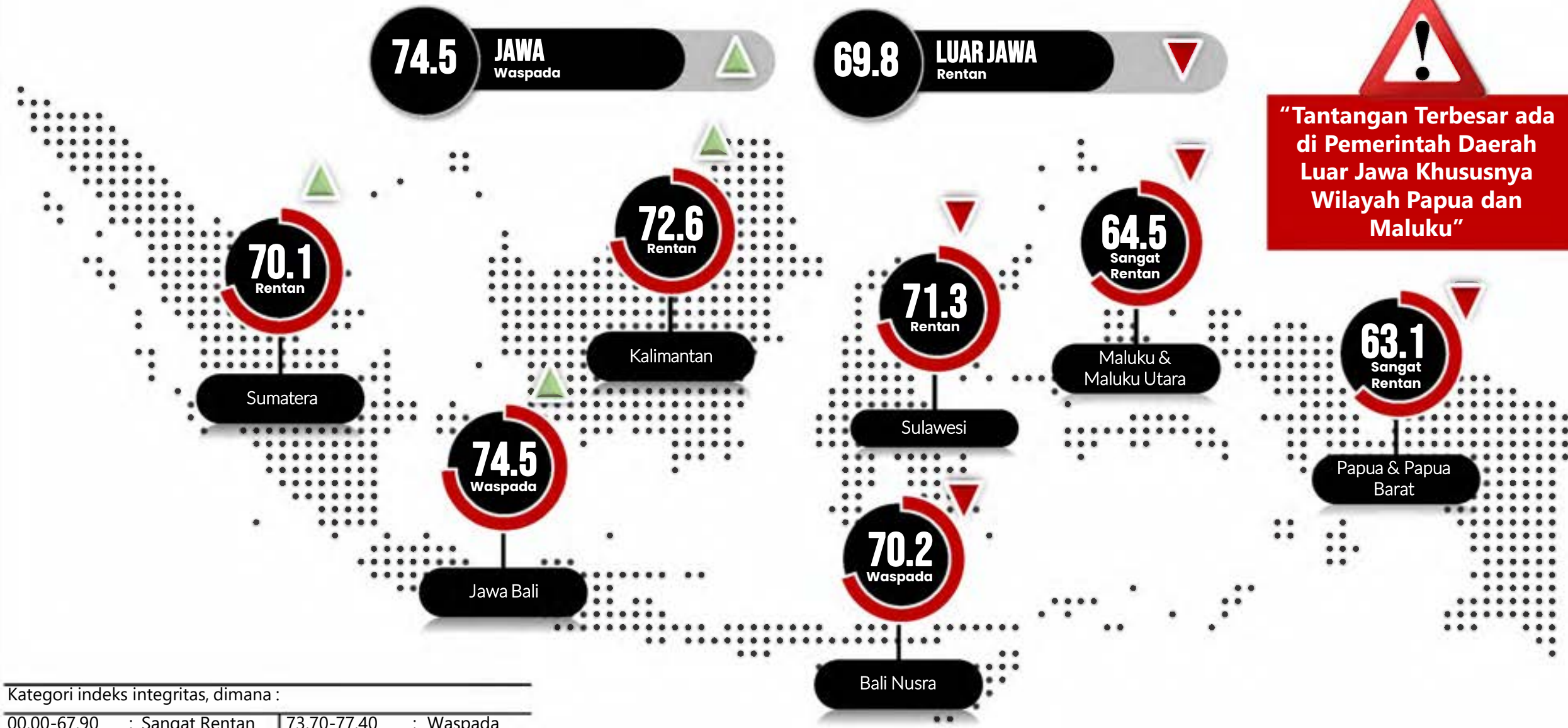

"Tantangan Terbesar ada di Pemerintah Daerah Luar Jawa Khususnya Wilayah Papua dan Maluku"

Kategori indeks integritas, dimana :			
00.00-67.90	: Sangat Rentan	73.70-77.40	: Waspada
68.00-73.60	: Rentan	77.50-100.00	: TerJAGA

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas : DIY

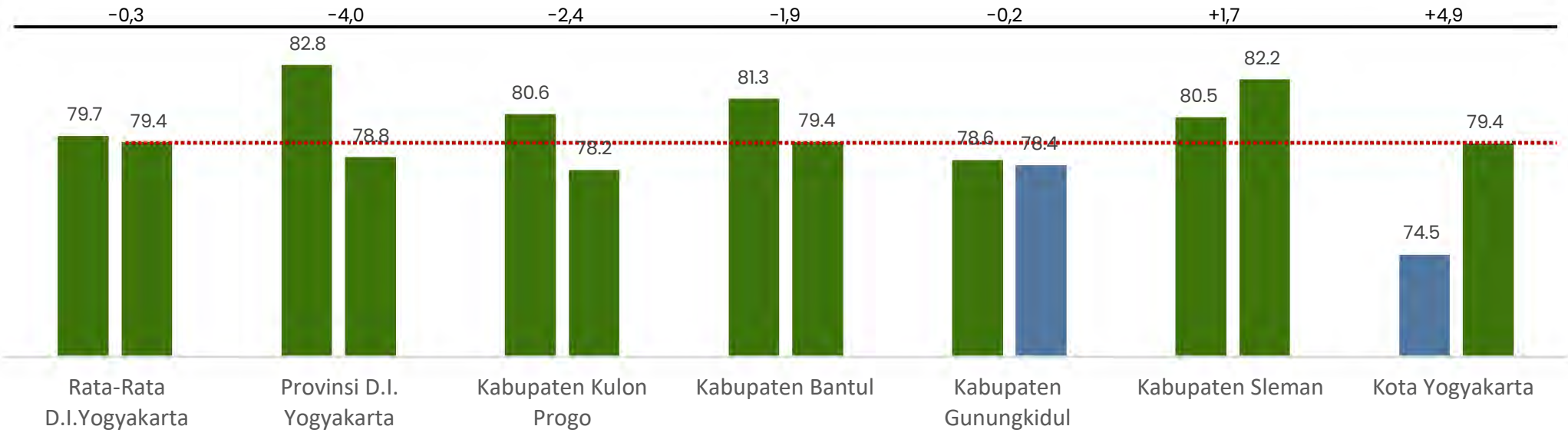

	Rata-Rata D.I.Yogyakarta		Provinsi D.I. Yogyakarta		Kabupaten Kulon Progo		Kabupaten Bantul		Kabupaten Gunungkidul		Kabupaten Sleman		Kota Yogyakarta	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Internal	81,7	79,4	86,9	78,8	81,3	78,2	80,2	79,4	78,7	78,4	80,1	82,2	83,1	79,4
Eksternal	81,	84,1	81,8	85,7	81,5	85,1	81,2	86,0	83,8	85,5	82,4	86,1	80,4	85,6
Eksper	81,5	81,5	82,9	76,9	84,3	78,4	85,4	82,5	76,8	80,6	81,5	87,4	78,2	83,2
Indeks SPI (Sebelum Faktor Koreksi)	81,7	83,5	83,8	81,9	82,5	82,5	82,4	83,7	79,7	82,9	81,4	85,7	80,4	84,1
Prevalensi Korupsi	9,6	3,6	3,3	0,5	0,0	4,7	1,5	4,0	0,0	7,2	1,5	3,2	51,0	2,0
Integritas Pelaksanaan Survei	10,1	40,0	6,5	36,7	18,9	39,6	9,6	41,2	10,8	36,0	7,3	34,3	7,4	52,0

Rata-Rata Pemprov : 69.2
Rata-Rata Pemkab : 70.6
Rata-Rata Pemkot : 72.2
Rata-Rata Kementerian : 77.9
Rata-Rata Lembaga : 79.5

Kategori indeks integritas :

00.0-67.9 Sangat Rentan
68.0-73.6 Rentan
73.70-77.4 Waspada
77.5-100.0 TerJAGA

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas : Jawa Tengah

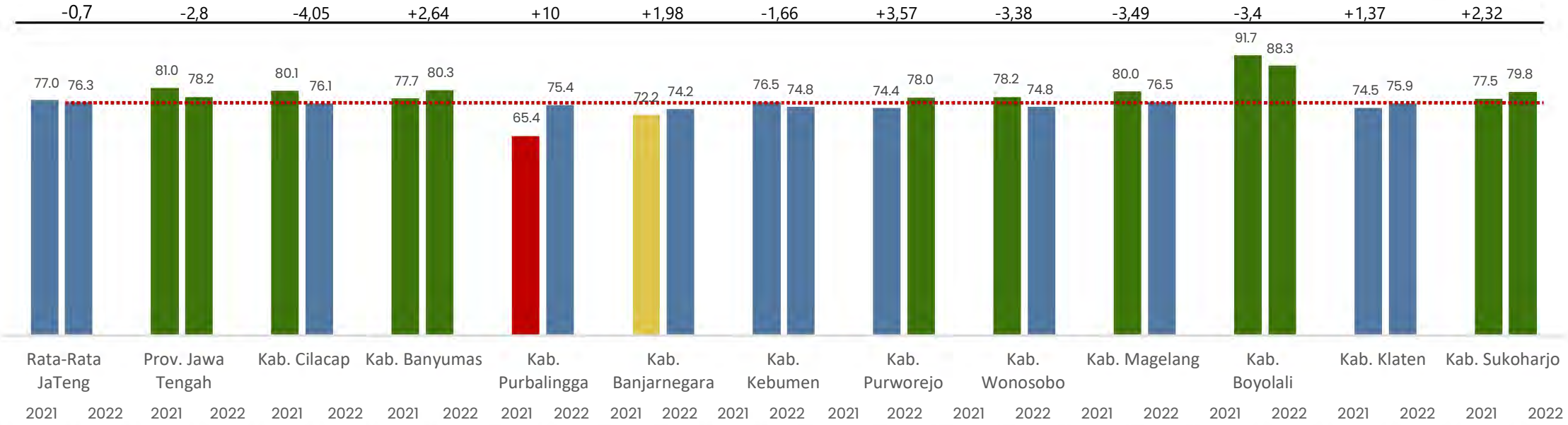

	Rata-Rata JaTeng		Prov. Jawa Tengah		Kab. Cilacap		Kab. Banyumas		Kab. Purbalingga		Kab. Banjarnegara		Kab. Kebumen		Kab. Purworejo		Kab. Wonosobo		Kab. Magelang		Kab. Boyolali		Kab. Klaten		Kab. Sukoharjo	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Internal	79,4	76,3	81,2	78,2	79,2	76,1	79,3	80,3	78,2	75,4	74,0	74,2	79,9	74,8	78,1	78,0	75,3	74,8	80,1	76,5	95,1	88,3	79,9	75,9	78,0	79,8
Eksternal	81,8	83,7	85,6	85,1	84,6	85,8	84,0	85,8	80,4	79,5	81,0	81,1	81,1	84,1	83,6	84,7	82,2	82,6	80,3	85,3	92,6	90,5	81,0	85,0	78,1	81,8
Eksper	78,8	77,1	80,4	78,1	81,2	74,6	84,3	87,4	75,8	79,4	67,1	78,4	75,0	73,3	76,4	79,3	80,0	77,7	87,0	76,6	90,6	93,9	71,2	75,1	82,2	87,4
Indeks SPI (Sebelum Faktor Koreksi)	80,0	80,4	82,4	81,7	81,7	80,2	82,7	85,4	78,0	79,5	73,8	79,0	78,5	79,7	79,3	81,3	79,3	80,0	82,7	80,9	92,6	91,5	77,1	79,9	79,6	84,0
Prevalensi Korupsi	17,5	4,2	2,7	1,3	7,7	6,0	40,2	10,4	113,2	4,0	3,1	7,6	3,1	8,8	40,2	1,6	1,5	10,6	9,2	5,5	1,5	0,8	10,7	5,2	9,2	2,4
Integritas Pelaksanaan Survei	12,5	38,4	11,4	38,6	8,2	35,3	8,5	35,6	10,2	39,3	12,7	38,9	17,3	37,6	7,7	36,1	10,0	37,2	18,3	39,5	7,5	36,4	14,5	35,1	11,6	43,8

Rata-Rata Pemprov : 69.2
Rata-Rata Pemkab : 70.6
Rata-Rata Pemkot : 72.2
Rata-Rata Kementerian : 77.9
Rata-Rata Lembaga : 79.5

Kategori indeks integritas :

00.0-67.9 Sangat Rentan
68.0-73.6 Rentan
73.70-77.4 Waspada
77.5-100.0 TerJAGA

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas : Jawa Tengah

	Rata-Rata JaTeng		Kab. Wonogiri		Kab. Karanganyar		Kab. Sragen		Kab. Grobogan		Kab. Blora		Kab. Rembang		Kab. Pati		Kab. Kudus		Kab. Jepara		Kab. Demak		Kab. Semarang		Kab. Temanggung	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Internal	79,4	76,3	82,0	80,8	76,9	78,0	77,8	80,1	72,8	73,4	79,9	72,5	76,8	77,1	79,1	78,3	81,2	75,2	80,9	72,8	83,1	74,6	77,1	78,0	78,5	77,4
Eksternal	81,8	83,7	87,0	86,0	75,9	83,8	79,3	86,7	82,6	86,4	84,7	83,9	84,0	80,1	77,4	86,6	80,4	85,3	76,0	83,9	88,2	82,6	79,6	84,6	85,9	81,2
Eksper	78,8	77,1	86,5	83,1	1,1	81,0	81,0	78,3	83,1	81,9	79,9	69,5	76,9	67,7	71,5	86,8	85,6	80,6	73,7	72,1	77,8	67,2	76,8	70,7	77,3	80,8
Indeks SPI (Sebelum Faktor Koreksi)	80,0	80,4	85,3	84,2	78,1	81,3	80,2	83,4	78,6	78,4	80,4	77,1	77,2	81,4	80,9	82,5	78,2	79,4	78,1	77,6	82,4	78,2	78,0	81,5	79,6	81,0
Prevalensi Korupsi	17,5	4,2	1,5	1,2	1,5	0,8	1,5	0,8	3,1	10,1	0,0	6,2	88,6	6,4	6,1	4,8	3,1	4,4	10,7	6,8	4,6	1,6	1,5	2,0	0,0	2,0
Integritas Pelaksanaan Survei	12,5	38,4	8,8	37,3	25,3	37,9	13,6	38,0	14,5	35,6	9,3	40,4	20,1	36,1	15,4	38,7	9,8	39,2	7,1	40,4	5,9	39,3	16,9	37,0	9,5	38,3

Rata-Rata Pemprov : 69.2
Rata-Rata Pemkab : 70.6
Rata-Rata Pemkot : 72.2
Rata-Rata Kementerian : 77.9
Rata-Rata Lembaga : 79.5

Kategori indeks integritas :

00.0-67.9 Sangat Rentan
68.0-73.6 Rentan
73.70-77.4 Waspada
77.5-100.0 TerJAGA

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas : Jawa Tengah

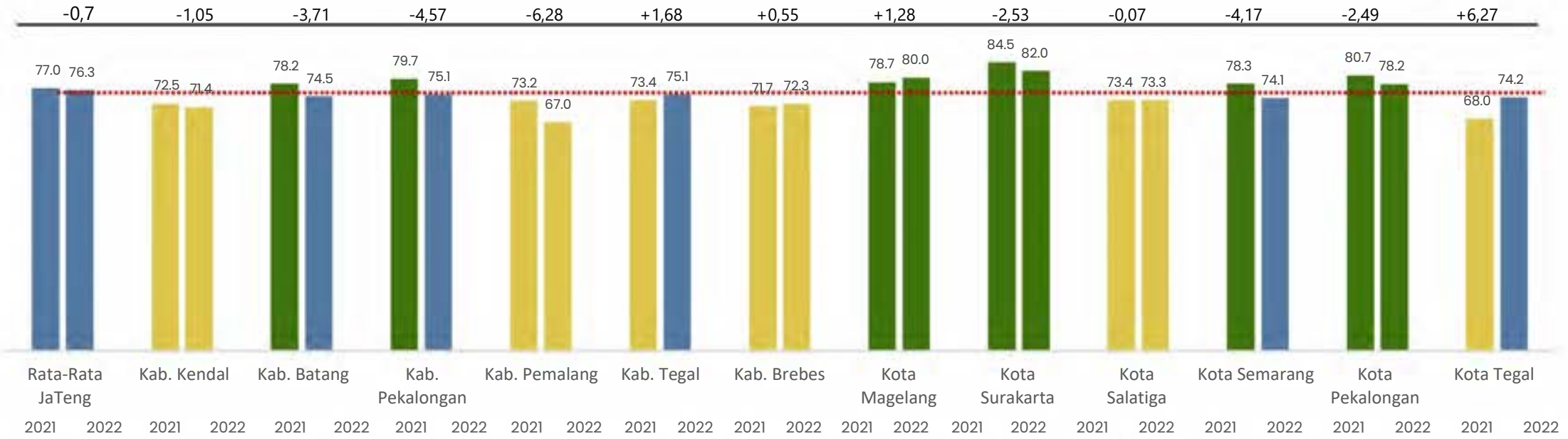

	Rata-Rata JaTeng		Kab. Kendal		Kab. Batang		Kab. Pekalongan		Kab. Pemalang		Kab. Tegal		Kab. Brebes		Kota Magelang		Kota Surakarta		Kota Salatiga		Kota Semarang		Kota Pekalongan		Kota Tegal	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Internal	79,4	76,3	79,9	71,4	81,3	74,5	81,0	75,1	77,3	67,0	76,8	75,1	77,4	72,3	78,1	80,0	82,5	82,0	77,2	73,3	80,4	74,1	82,1	78,2	79,2	74,2
Eksternal	81,8	83,7	80,5	78,2	86,4	86,3	79,5	80,8	79,8	79,4	71,5	82,2	74,5	79,6	82,7	86,8	87,1	86,6	81,1	81,1	80,3	84,5	82,0	85,6	84,7	80,2
Eksper	78,8	77,1	79,5	69,6	72,8	78,1	82,6	73,8	70,8	55,2	79,7	77,5	73,9	71,4	80,7	82,0	86,9	87,6	77,3	72,1	79,2	72,6	82,1	76,0	76,5	78,8
Indeks SPI (Sebelum Faktor Koreksi)	80,0	80,4	80,0	75,0	79,9	81,8	81,1	78,6	75,7	70,3	76,1	78,7	75,2	76,3	80,6	83,5	85,7	85,7	78,5	77,2	79,9	79,3	82,0	81,5	80,0	79,5
Prevalensi Korupsi	17,5	4,2	62,0	2,8	1,5	3,2	1,5	1,6	9,2	0,0	10,7	0,8	10,7	3,2	1,5	1,6	0,0	3,6	43,3	4,0	6,1	10,3	3,1	2,0	114,7	9,0
Integritas Pelaksanaan Survei	12,5	38,4	11,6	36,5	15,3	54,1	12,9	37,6	16,1	39,5	16,5	40,4	24,0	40,0	17,4	37,6	11,6	35,9	7,2	36,8	10,5	37,6	11,0	35,3	2,5	40,6

Rata-Rata Pemprov : 69.2
Rata-Rata Pemkab : 70.6
Rata-Rata Pemkot : 72.2
Rata-Rata Kementerian : 77.9
Rata-Rata Lembaga : 79.5

Kategori indeks integritas :

00.0-67.9 Sangat Rentan
68.0-73.6 Rentan
73.70-77.4 Waspada
77.5-100.0 TerJAGA

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas Per Dimensi : D.I.Yogyakarta

Indeks SPI 2022 = (0,30 Internal + 0,33 Eksternal + 0,37 Eksper) - 0,20 Faktor Koreksi

Survei Penilaian Integritas

Lampung	INT. Perdagangan Pengaruh	INT. Pengelolaan PBJ	INT. Pengelolaan Anggaran	INT. Pengelolaan SDM	INT. Integritas Pelaksanaan Tugas	INT. Sosialisasi Antikorupsi	INT. Transparansi	EXP. Integritas Instansi	EXT. Upaya Pencegahan Korupsi	EXT. Transparansi & Keadilan Layanan	EXT. Integritas Pegawai
Prov. D.I. Yogyakarta	79,3	92,15	89,7	83,92	87,45	70,25	88,6	76,88	78,76	79,03	97,76
Kab. Kulon Progo	80,58	94,23	91,56	85,57	90,55	64,65	88,82	78,41	78,7	77,76	97,27
Kab. Bantul	77,24	92,69	89,73	80,74	88,14	67,13	85,97	82,46	81,85	77,03	97,59
Kab. Gunungkidul	78,7	93,91	90,61	81,39	88,8	62,71	86,82	80,63	79,66	77,39	97,81
Kab. Sleman	76,25	94,71	91,7	82,24	88,94	66,12	86,63	87,37	80,58	78,93	97,28
Pemerintah Kota Yogyakarta	78,42	93,25	91,59	82,2	88,81	69,92	84,22	83,2	78,25	78,96	98,11
Rata-rata Wilayah D.I.Yogyakarta	78,42	93,49	90,82	82,67	88,78	66,8	86,84	81,5	79,64	78,2	97,64

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas Per Dimensi : Jawa Tengah

Indeks SPI 2022 = (0,30 Internal + 0,33 Eksternal + 0,37 Eksper) - 0,20 Faktor Koreksi

Survei Penilaian Integritas

Lampung	INT. Perdagangan Pengaruh	INT. Pengelolaan PBJ	INT. Pengelolaan Anggaran	INT. Pengelolaan SDM	INT. Integritas Pelaksanaan Tugas	INT. Sosialisasi Antikorupsi	INT. Transparansi	EXP. Integritas Instansi	EXT. Upaya Pencegahan Korupsi	EXT. Transparansi & Keadilan Layanan	EXT. Integritas Pegawai
Provinsi Jawa Tengah	▲ 77,42	▼ 91,18	▼ 86,37	▲ 82,01	▼ 85,27	▲ 69,64	▼ 86,95	▼ 78,13	▲ 77,28	▼ 79,04	▲ 97,33
Kabupaten Cilacap	▲ 74,5	▲ 91,73	▲ 87,44	▲ 77,63	▼ 85,57	▲ 68,51	▲ 84,84	▼ 74,59	▲ 80,95	▼ 76,54	▲ 98,22
Kabupaten Banyumas	▲ 74,61	▲ 93,7	▲ 90,97	▲ 79,79	▲ 87,87	▲ 67,43	▲ 87,35	▲ 87,43	▲ 80,79	▼ 76,9	▲ 98,09
Kabupaten Purbalingga	▲ 73,18	▼ 92,02	▲ 88,71	▲ 78,97	▼ 86,96	▲ 58,13	▲ 85,48	▲ 79,36	▲ 69,44	▼ 70,51	▼ 96,37
Kabupaten Banjarnegara	▲ 68,57	▲ 90,38	▲ 85,21	▲ 75,74	▲ 84,92	▲ 60,48	▲ 81,06	▲ 78,43	▲ 71,12	▼ 73,56	▲ 96,76
Kabupaten Kebumen	▲ 76,63	▲ 94,2	▲ 91	▲ 81,3	▲ 88,38	▲ 63,87	▲ 87,38	▼ 73,33	▲ 77,28	▼ 75,8	▲ 97,62
Kabupaten Purworejo	▲ 73,05	▲ 90,71	▲ 87,35	▲ 78,56	▼ 85,71	▲ 65,95	▲ 83,25	▲ 79,33	▲ 79,98	▼ 77,3	▼ 95,32
Kabupaten Wonosobo	▲ 72,22	▲ 90,85	▲ 86,98	▲ 77,26	▲ 85,26	▲ 67	▲ 84,52	▼ 77,68	▲ 76,93	▼ 73,34	▲ 95,85
Kabupaten Magelang	▼ 73,05	▼ 92,02	▲ 89,84	▲ 78,35	▼ 86,04	▲ 69,11	▼ 84,48	▼ 76,58	▲ 80,04	▼ 76,55	▲ 97,65
Kabupaten Boyolali	▼ 83,95	▼ 95,68	▼ 95,75	▼ 89,76	▼ 92,79	▼ 82,25	▼ 91,51	▲ 93,9	▼ 87,06	▼ 83,94	▲ 99,19
Kabupaten Klaten	▼ 73,52	▲ 90,87	▲ 87,44	▲ 78,15	▼ 86,22	▲ 64,75	▲ 84,3	▲ 75,07	▲ 80,49	▼ 75,76	▲ 97,24
Kabupaten Sukoharjo	▲ 76,61	▲ 93,04	▲ 88,87	▲ 80,38	▲ 88,16	▲ 66,11	▲ 85,68	▲ 87,42	▲ 73,97	▼ 73,42	▲ 96,11
Kabupaten Wonogiri	▲ 78,35	▼ 94,68	▲ 90,6	▲ 83,44	▼ 88,94	▲ 65,46	▲ 87,42	▼ 83,11	▲ 80,17	▼ 78,12	▲ 98,24
Kabupaten Karanganyar	▲ 75,64	▲ 92,11	▲ 88,6	▲ 81,5	▲ 87,55	▲ 68,01	▲ 86,8	▼ 78,33	▲ 79,51	▲ 75,31	▲ 95,02
Kabupaten Sragen	▲ 75,73	▲ 92,21	▲ 89,5	▲ 79,51	▲ 86,38	▲ 65,74	▲ 86,39	▼ 81,93	▲ 82,1	▲ 78,4	▲ 98,01
Kabupaten Grobogan	▲ 76,66	▲ 89,37	▲ 87,34	▲ 76,63	▲ 84,5	▲ 66,41	▲ 85,26	▼ 69,54	▲ 82,75	▼ 78,35	▲ 96,67
Kabupaten Blora	▼ 74,16	▼ 91,28	▲ 88,6	▲ 77,2	▼ 85,93	▲ 68,11	▲ 85,79	▼ 67,66	▼ 77,78	▼ 75,19	▲ 97,15
Kabupaten Rembang	▲ 67,69	▼ 89,25	▼ 85,62	▲ 70,61	▼ 81,9	▼ 61,34	▼ 82,76	▲ 86,83	▼ 72,83	▼ 68,96	▲ 96,39
Rata-rata Wilayah Jawa Tengah	74,5	91,75	88,51	78,36	86,34	66,28	85,21	77,06	77,60	75,20	96,66

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Indeks Integritas Per Dimensi : Jawa Tengah

Indeks SPI 2022 = (0,30 Internal + 0,33 Eksternal + 0,37 Eksper) - 0,20 Faktor Koreksi

Survei Penilaian Integritas

Lampung	INT. Perdagangan Pengaruh	INT. Pengelolaan PBJ	INT. Pengelolaan Anggaran	INT. Pengelolaan SDM	INT. Integritas Pelaksanaan Tugas	INT. Sosialisasi Antikorupsi	INT. Transparansi	EXP. Integritas Instansi	EXT. Upaya Pencegahan Korupsi	EXT. Transparansi & Keadilan Layanan	EXT. Integritas Pegawai
Kabupaten Pati	78,24	91,38	87,86	78,45	85,98	58,33	84,95	80,62	82,24	78,91	97,33
Kabupaten Kudus	75,24	92,18	90,26	78,39	87,77	66,75	85,59	72,08	79,99	77,03	97,32
Kabupaten Jepara	75,9	94,07	90,29	79,45	86,73	72,09	86,23	67,23	78,09	74,39	97,55
Kabupaten Demak	77,05	93,38	89,17	81,18	87,4	65,76	87,07	70,65	78,01	73,08	95,02
Kabupaten Semarang	69,66	90,29	87,19	75,64	85,22	64,86	84,28	80,81	79,79	74,48	97,62
Kabupaten Temanggung	75,96	93,26	90,74	79,13	87,78	68,66	85,17	79,55	73,77	72,45	95,61
Kabupaten Kendal	71,08	89,25	87,38	73,31	83,73	63,05	83,02	69,64	69,75	69,4	93,56
Kabupaten Batang	74,87	93,66	87,74	78,47	86,63	66,5	84,94	78,07	78,53	82,53	96,77
Kabupaten Pekalongan	76,83	93,26	87,89	79,47	88,63	66,14	84,36	73,83	74,62	72,2	93,9
Kabupaten Pemalang	72,77	90,85	85,55	75,91	83,99	63	80,73	55,24	71,04	70,04	95,16
Kabupaten Tegal	67,92	88,34	84,56	72,3	80,97	62,33	81,54	77,49	76,3	70,96	97,24
Kabupaten Brebes	72,41	91,31	85,11	75,53	83,3	62,68	82,45	71,38	75,79	70,5	91,07
Kota Magelang	74,54	91,57	89,92	78,14	88,73	67,28	86,86	81,95	82,79	77,19	98,67
Kota Surakarta	74,55	91,77	90,09	80,02	87,16	70,41	87,56	87,57	82,15	78,34	97,91
Kota Salatiga	72,33	89,85	89	74,24	84,14	65,34	82,7	72,12	71,62	73,53	96,21
Kota Semarang	75,04	90,53	89,7	77,58	87,07	69,75	88,22	72,55	78,13	76,04	97,51
Kota Pekalongan	77	92,01	89,67	81,08	88,94	73,55	87,74	75,98	79,01	77,85	98,37
Kota Tegal	75,02	90,64	88,02	75,83	85,58	61,34	83,09	78,82	71,63	71,41	95,7
Rata-rata Wilayah Jawa Tengah	74,5	91,75	88,51	78,36	86,34	66,28	85,21	77,06	77,60	75,20	96,66

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Risiko Korupsi

Survei Penilaian Integritas

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontra

detikNews > Berita

Sejak 2008, Sudah 8 Kepala Daerah di Papua Tersangkut Kasus Korupsi

Yogi Ernes - detikNews

Senin, 20 Feb 2023 20:52 WIB

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ricky pun langsung ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan, Senin (20/2). (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta - Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak resmi ditahan KPK atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap sudah ada delapan kepala daerah di Papua yang terjerat kasus korupsi sejak 2008.

"Sepanjang sejak tahun 2008 sampai 2022 setidaknya ada 8 orang kepala daerah di Papua yang tersangkut perkara korupsi," kata Firli, dalam jumpa pers, Senin (20/2/2023).

Firli menuturkan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi adalah Bupati Yapen Waropen, Bupati Supiori, Bupati Boven Digul, Bupati Biak Numfor, Gubernur Papua periode 2006-2011, Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, serta Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023.

LENOVO
THINK ON.
Teknologi yang memudahkan manusia. Itulah Lebih Cerdas

- Bupati Yapen Waropen
- Bupati Boven Digoel
- Bupati Supiori
- Gubernur Papua periode 2006-2011
- Bupati Biak Numfor
- Bupati Mimika
- Bupati Mamberamo Tengah
- Gubernur Papua (saat ini) Lukas Enembe

Tingkat keyakinan risiko kejadian suap dan gratifikasi

Pengalaman & Persepsi

25%
INTERNAL

Pegawai menilai/ melihat gratifikasi/ suap kepada pegawai instansi

25%
EKSTERNAL

Pengguna Layanan menilai/ melihat gratifikasi/ suap kepada pegawai instansi

67%
EKSPER

10 Pemda Tertinggi Risiko Suap/Gratifikasi

No	Pemerintah Daerah	Suap/ Gratifikasi
1	Kabupaten Merauke	74.7%
2	Kabupaten Deiyai	72.7%
3	Provinsi Papua Barat	58.7%
4	Kota Subulussalam	55.9%
5	Kabupaten Teluk Wondama	53.1%
6	Kabupaten Puncak	52.9%
7	Kabupaten Puncak Jaya	50.0%
8	Kabupaten Mimika	49.0%
9	Kabupaten Teluk Bintuni	47.2%
10	Kabupaten Pegunungan Arfak	46.3%

32% Pemerintah Daerah masuk dalam Risiko Tinggi dan Sangat Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Risiko Korupsi (Indeks SPI 2022 : 62,15) SANGAT RENTAN

Survei Penilaian Integritas

KPK: Bupati Kapuas dan Istri Pungli SKPD hingga Rp 8,7 Miliar

Yogi Ernes - detikNews

Selasa, 28 Mar 2023 17:49 WIB

2023

RISIKO TINGGI KE SANGAT TINGGI 2022

Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Level Resiko
(403_A) Banyak yang Menggunakan Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi	< 0.07	0.07-0.10	0.11-0.15	>0.15	0,14
(403_B) Nepotisme (Suku, Agama, Kekerabatan dll) mempengaruhi Pengambilan Keputusan	< 0.15	0.15-0.19	0.20-0.25	>0.26	0,25
(404_A) Percaya Atasan memberikan perintah melanggar	< 0.09	0.09-0.11	0.12-0.15	>0.16	0,1
(404_B) Banyak Pegawai melakukan tindakan tidak sesuai aturan	< 0.06	0.06-0.07	0.08-0.11	>0.12	0,1
(405_A) Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan	< 0.13	0.13-0.16	0.17-0.22	>0.23	0,23
(405_B) Sering Menerima Pemberian (Pengalaman)	< 0.03	0.03-0.04	0.05-0.06	>0.07	0,04
(502_B) Pernah Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap	< 0.05	0.05-0.07	0.08-0.10	>0.11	0,01
(602_B) Sering Melihat/Mendengar pegawai memberikan sesuatu untuk promosi/mutasi	< 0.02	0.02-0.029	0.03-0.05	>0.06	0,06

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Risiko Korupsi

Seberapa Akurat Hasil SPI Menggambarkan Risiko Korupsi Sebelum Muncul Menjadi Kasus?

Survei Penilaian Integritas

Bupati Penajam Paser Utara jadi 'tersangka kasus korupsi', 'jadikan pelajaran dalam proyek ibu kota negara'

14 Januari 2022

2022

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, jadi tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK.

Para pegiat anti-korupsi meminta agar proyek pembangunan Ibu kota baru RI di Kalimantan Timur dilakukan transparan, sehingga dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Penajam Paseer Utara, tidak terulang.

RISIKO SANGAT TINGGI — 2021

Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(702B_a) Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	<= 0.03	0.04-0.05	0.06-0.08	>=0.09	0.08
(702B_b) Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	<= 0.03	0.03-0.05	0.06-0.09	>=0.10	0.08
(702B_c) Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	<= 0.05	0.06-0.08	0.09-0.14	>=0.15	0.16
(702B_d) Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	<= 0.03	0.04-0.05	0.06-0.08	>=0.09	0.09
(702B_e) Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	<= 0.02	0.03-0.04	0.05-0.07	>=0.08	0.10

Risiko Korupsi

Seberapa Akurat Hasil SPI Menggambarkan Risiko Korupsi Sebelum Muncul Menjadi Kasus?

Survei Penilaian Integritas

Menu | Cari berita...

Bisnis.com

Kasus Korupsi Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Dugaan Patokan Jumlah Uang untuk Promosi Jabatan

KPK mendalami dugaan adanya patokan pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi promosi jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Newswire - Bisnis.com

11 Februari 2022 | 20:50 WIB

2022

Tersangka Wali Kota non

rusia-kesulitan-rebut-ibu-...

RISIKO SANGAT TINGGI — **2021**

Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(403_A) Banyak yang Menggunakan Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi	< 0.07	0.07-0.10	0.11-0.15	>0.15	0.10
(403_B) Nepotisme (Suku, Agama, Kekerabatan dll) mempengaruhi Pengambilan Keputusan	< 0.15	0.15-0.19	0.20-0.25	>0.26	0.18
(404_A) Percaya Atasan memberikan perintah melanggar	< 0.09	0.09-0.11	0.12-0.15	>0.16	0.06
(404_B) Banyak Pegawai melakukan tindakan tidak sesuai aturan	< 0.06	0.06-0.07	0.08-0.11	>0.12	0.06
(405_A) Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan	< 0.13	0.13-0.16	0.17-0.22	>0.23	0.23
(405_B) Sering Menerima Pemberian (Pengalaman)	< 0.03	0.03-0.04	0.05-0.06	>0.07	0.05
(502_B) Pernah Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap	< 0.05	0.05-0.07	0.08-0.10	>0.11	0.24
(602_B) Sering Melihat/Mendengar pegawai memberikan sesuatu untuk promosi/mutasi	< 0.02	0.02-0.029	0.03-0.05	>0.06	0.12

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Risiko Korupsi

Seberapa Akurat Hasil SPI Menggambarkan Risiko Korupsi Sebelum Muncul Menjadi Kasus?

Survei Penilaian Integritas

HOME — NASIONAL — HUKUM

2021

Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.

Eks Wali Kota Banjar Diduga Terima Duit dari Banyak Kontraktor

Nasional | KPK | Kasus Suap | kasus korupsi | Korupsi Kota Banjar | korupsi proyek jalan

Candra Yuri Nuralam • 27 Februari 2022 07:24

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi untuk mendalami dugaan suap pengerjaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banjar pada 2012 sampai 2017. Mereka diminta memberikan informasi terkait penerimaan uang suap yang dilakukan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno.

RISIKO TINGGI 2021

Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
(702B_a) Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	< 0.03	0.03-0.049	0.05-0.079	>0.08	0.047
(702B_b) Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	< 0.03	0.03-0.049	0.05-0.089	>0.09	0.057
(702B_c) Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	< 0.05	0.05-0.079	0.08-0.139	>0.14	0.083
(702B_d) Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	< 0.03	0.03-0.049	0.05-0.079	>0.08	0.047
(702B_e) Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	< 0.02	0.02-0.039	0.04-0.069	>0.07	0.026

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Perbaikan & Rekomendasi dari 4 Dimensi Terendah

Survei Penilaian Integritas

1. Pengelolaan Barang dan Jasa

Risiko korupsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diukur dari penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap pengelolaan anggaran dalam bentuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit kerja/organisasi. Berbagai bentuk permasalahan dalam PBJ yang dapat terjadi dimulai dari pemilihan yang telah diatur untuk memenangkan penyedia tertentu, indikasi suap/gratifikasi kepada pihak pihak yang terkait dengan proses PBJ, hingga hasil dari PBJ tersebut yang kurang bermanfaat.

Contoh Rekomendasi:

Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system.

2. Integritas Instansi

Resiko-resiko pada dimensi integritas instansi perlu diperhatikan karena meliputi praktik-praktik illegal seperti suap dan pungli.

Contoh Rekomendasi:
Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut:

- Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi.
- Menegakkan sanksi/ hukuman penerimaan suap/ gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten.
- Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi.
- Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.

3. Sosialisasi AntiKorupsi

Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui. . Sosialisasi antikorupsi ini terdiri dari berbagai hal yang terkait dengan tindakan korupsi atau hal-hal yang dapat menjadi pintu masuk dari tindak pidana korupsi itu sendiri seperti mengelola konflik kepentingan, menolak/melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN/LHKASN, hingga melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui oleh pegawai.

Contoh Rekomendasi:
Perbaikan mendasar upaya internalisasi peningkatan kesadaran dan perilaku melaporkan LHKPN melalui: (1) Sosialisasi, kampanye, dan pelatihan secara periodik dan berkelanjutan. (2) Memperkuat aturan dengan memperluas cakupan wajib lapor, sanksi dll. (3) Mengaitkan pelaporan dengan syarat untuk mendapatkan hak (promosi, insentif, dll). (4) Memberikan hukuman sosial/administratif kepada yang tidak melapor.

4. Transparansi & Keadilan Layanan

- Transparansi dan keadilan layanan: meliputi adanya kejelasan informasi layanan, kemudahan memahami **prosedur layanan, ketidakadilan layanan, nepotisme dalam pemberian layanan/pelaksanaan tugas.**
- Upaya pencegahan korupsi: meliputi keberadaan kampanye/himbauan antikorupsi, keberadaan media pengaduan/ pelaporan masyarakat, upaya perbaikan untuk pencegahan korupsi, dan persepsi terhadap integritas pegawai

Contoh Rekomendasi:
Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan prosedur layanan dengan memastikan berbagai hal berikut:

- Penyederhanaan proses bisnis yang tetap berada dalam koridor peraturan perundangundangan.
- Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan.
- Melakukan evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

Pemetaan Risiko Korupsi

Pengelolaan PBJ

Pemetaan Risiko Korupsi DIY

Pengelolaan PBJ

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi D.I.Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
1	Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
2	Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
3	Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
4	Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
6	Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Pengelolaan PBJ

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Magelang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo
1	Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
2	Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
3	Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
4	Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
6	Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Pengelolaan PBJ

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Blora	Kabupaten Rembang	Kabupaten Pati	Kabupaten Kudus	Kabupaten Jepara	Kabupaten Demak	Kabupaten Semarang	Kabupaten Temanggung
1	Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
2	Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang
3	Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4	Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
6	Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Pengelolaan PBJ

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Kendal	Kabupaten Batang	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Tegal	Kabupaten Brebes	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
1	Percaya terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
2	Sering Melihat/Mendengar pemilihan diatur	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Sering Melihat/Mendengar kualitas barang tidak sesuai	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Sering Melihat/Mendengar pemenang punya hubungan kekerabatan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
5	Sering Melihat/Mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
6	Sering Melihat/Mendengar hasil pengadaan tidak memberikan manfaat	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

Pemetaan Risiko Korupsi
Integritas Instansi

Pemetaan Risiko Korupsi DIY

Integritas Instansi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi D.I.Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
1	Praktik Suap	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
2	Praktik Pungli	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
3	Konflik Kepentingan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
4	Transparansi Layanan Publik	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
5	Intervensi Pihak Lain	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
6	Kualitas Transparansi Anggaran	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
7	Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
8	Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
9	Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
10	Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
11	Integritas Pegawai	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
12	Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Integritas Instansi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Magelang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo
1	Praktik Suap	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
2	Praktik Pungli	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
3	Konflik Kepentingan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4	Transparansi Layanan Publik	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Intervensi Pihak Lain	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
6	Kualitas Transparansi Anggaran	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
7	Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
8	Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
9	Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
10	Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
11	Integritas Pegawai	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
12	Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Integritas Instansi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Magelang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo
1	Praktik Suap	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
2	Praktik Pungli	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
3	Konflik Kepentingan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4	Transparansi Layanan Publik	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5	Intervensi Pihak Lain	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
6	Kualitas Transparansi Anggaran	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
7	Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
8	Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
9	Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
10	Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
11	Integritas Pegawai	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
12	Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Integritas Instansi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Blora	Kabupaten Rembang	Kabupaten Pati	Kabupaten Kudus	Kabupaten Jepara	Kabupaten Demak	Kabupaten Semarang	Kabupaten Temanggung
1	Praktik Suap	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah
2	Praktik Pungli	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3	Konflik Kepentingan	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
4	Transparansi Layanan Publik	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah
5	Intervensi Pihak Lain	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah
6	Kualitas Transparansi Anggaran	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
7	Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah
8	Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah
9	Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
10	Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
11	Integritas Pegawai	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
12	Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	Sedang	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Integritas Instansi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Kendal	Kabupaten Batang	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Tegal	Kabupaten Brebes	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
1	Praktik Suap	Sedang	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah
2	Praktik Pungli	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah
3	Konflik Kepentingan	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Transparansi Layanan Publik	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
5	Intervensi Pihak Lain	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Kualitas Transparansi Anggaran	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
7	Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi
8	Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi
10	Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah
11	Integritas Pegawai	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi
12	Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

Pemetaan Internalisasi

Sosialisasi AntiKorupsi

Pemetaan Internalisasi DIY

Sosialisasi AntiKorupsi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi D.I.Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
1	Pelaporan LHKPN/LHKASN	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Pelaporan Gratifikasi	Kurang	Kurang	Kurang	Rendah	Kurang	Kurang
3	Pelaporan Suap	Kurang	Rendah	Kurang	Rendah	Kurang	Kurang
4	Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/ diketahui	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	Menghindari konflik kepentingan	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
6	Keyakinan bahwa pegawai yang diduga melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah
8	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Unit Kerja untuk mendorong pencegahan korupsi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Internalisasi Jawa Tengah

Sosialisasi AntiKorupsi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Magelang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo
1	Pelaporan LHKPN/LHKASN	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kurang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Pelaporan Gratifikasi	Kurang	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang	Rendah	Kurang
3	Pelaporan Suap	Kurang	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang	Kurang	Kurang
4	Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/ diketahui	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kurang	Rendah	Rendah
5	Menghindari konflik kepentingan	Kurang	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang	Kurang	Kurang
6	Keyakinan bahwa pegawai yang diduga melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi	Tinggi	Kurang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Kurang	Sedang	Sedang	Tinggi	Kurang	Sedang
8	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Unit Kerja untuk mendorong pencegahan korupsi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Internalisasi Jawa Tengah

Sosialisasi AntiKorupsi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Blora	Kabupaten Rembang	Kabupaten Pati	Kabupaten Kudus	Kabupaten Jepara	Kabupaten Demak	Kabupaten Semarang	Kabupaten Temanggung
1	Pelaporan LHKPN/LHKASN	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Pelaporan Gratifikasi	Rendah	Kurang	Rendah	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Sedang	Kurang	Kurang	Kurang
3	Pelaporan Suap	Rendah	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Sedang	Kurang	Kurang	Kurang
4	Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/ diketahui	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	Menghindari konflik kepentingan	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Kurang	Rendah	Kurang	Kurang
6	Keyakinan bahwa pegawai yang diduga melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
7	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Kurang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Kurang
8	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Unit Kerja untuk mendorong pencegahan korupsi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Kurang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Internalisasi Jawa Tengah

Sosialisasi AntiKorupsi

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Kendal	Kabupaten Batang	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Tegal	Kabupaten Brebes	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
1	Pelaporan LHKPN/LHKASN	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
2	Pelaporan Gratifikasi	Rendah	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang	Rendah
3	Pelaporan Suap	Rendah	Kurang	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang	Rendah
4	Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/ diketahui	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	Menghindari konflik kepentingan	Rendah	Kurang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang	Rendah
6	Keyakinan bahwa pegawai yang diduga melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi	Sedang	Sedang	Kurang	Rendah	Kurang	Kurang	Tinggi	Tinggi	Kurang	Tinggi	Tinggi	Sedang
8	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Unit Kerja untuk mendorong pencegahan korupsi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

Pemetaan Risiko Korupsi

Transparansi dan Keadilan Layanan

Pemetaan Risiko Korupsi DIY

Transparansi dan Keadilan Layanan

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi D.I.Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
1	Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Kemudahan untuk mengikuti SOP	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
4	Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Transparansi dan Keadilan Layanan

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Magelang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo
1	Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Kemudahan untuk mengikuti SOP	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
3	Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Transparansi dan Keadilan Layanan

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Blora	Kabupaten Rembang	Kabupaten Pati	Kabupaten Kudus	Kabupaten Jepara	Kabupaten Demak	Kabupaten Semarang	Kabupaten Temanggung
1	Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Kemudahan untuk mengikuti SOP	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
3	Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Pemetaan Risiko Korupsi Jawa Tengah

Transparansi dan Keadilan Layanan

Survei Penilaian Integritas

No.	Indikator Pengukuran	Kabupaten Kendal	Kabupaten Batang	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Tegal	Kabupaten Brebes	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
1	Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Kemudahan untuk mengikuti SOP	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Format Matriks Tindak Lanjut

Matriks ini diisikan dengan bentuk kegiatan/ program di Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan **kegiatan pencegahan korupsi** di lingkungan Pemda **dan memiliki keterkaitan dengan rekomendasi dalam hasil SPI 2022**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Area Intervensi MCP	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
A	Risiko Sangat Tinggi				
1	Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap....				
2	.....				
B	Risiko Tunggi				
1	Perbaikan mendasar terhadap....				
2	.....				
C	Risiko Sedang				
1	Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye.....				
2	.....				
D	Risiko Rendah				
1	Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor.....				
2	.....				

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Bab 03.

Persiapan SPI 2023

Kesuksesan Survei

Kesuksesan Survei Penilaian Integritas (SPI) memerlukan partisipasi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

9.106.420
Data Populasi
Dikirimkan ke KPK

2.061.365
WA/email Blast
Dikirimkan oleh KPK

407.108
Responden
Mengisi survei daring dan luring (CAPI)

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Catatan Evaluasi Pelaksanaan Survei

Survei Penilaian Integritas

2.061.365

Menerima link survei melalui WhatApp atau mail

373.833

Mengisi link survei

18%

Response Rate

120 Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah

Memiliki

Anomali Data pada Isian Kategori Peserta

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Data Populasi Internal 2022 DIY

Survei Penilaian Integritas

WILAYAH	N DATA POPULASI	N DATA CLEAN	PEROLEHAN		CAPI
			ELIGIBLE	NON-ELIGIBLE	
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	4.116	628	335	-	Tidak
KOTA YOGYAKARTA	1.662	1.083	806	21	Tidak
KABUPATEN BANTUL	3.360	1.094	666	6	Tidak
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	7.056	625	261	33	Tidak
KABUPATEN KULON PROGO	4.630	895	333	19	Tidak
KABUPATEN SLEMAN	1.979	1.651	566	6	Tidak

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Data Populasi Internal 2022 Jawa Tengah

Survei Penilaian Integritas

WILAYAH	N DATA POPULASI	N DATA CLEAN	PEROLEHAN		CAPI
			ELIGIBLE	NON-ELIGIBLE	
PROVINSI JAWA TENGAH	3.588	2.700	926	28	Tidak
KOTA SEMARANG	13.195	3.589	629	53	Tidak
KABUPATEN BANJARNEGARA	1.799	1.010	319	2	Tidak
KABUPATEN BANYUMAS	1.888	1.042	352	9	Tidak
KABUPATEN BATANG	1.133	984	465	9	Tidak
KABUPATEN BLORA	3.519	894	307	10	Tidak
KABUPATEN BOYOLALI	1.295	1.145	250	54	Tidak
KABUPATEN BREBES	1.787	1.451	509	6	Tidak
KABUPATEN CILACAP	3.243	1.985	605	2	Tidak
KABUPATEN DEMAK	2.248	1.298	410	6	Tidak
KABUPATEN GROBOGAN	6.743	1.480	405	23	Tidak
KABUPATEN JEPARA	9.207	854	169	-	Tidak
KABUPATEN KARANGANYAR	2.698	2.221	781	25	Tidak
KABUPATEN KEBUMEN	2.348	1.596	675	134	Tidak
KABUPATEN KENDAL	14.023	2.042	367	66	Tidak
KABUPATEN KLATEN	1.894	1.259	483	6	Tidak
KABUPATEN KUDUS	1.605	1.120	437	5	Tidak
KABUPATEN MAGELANG	1.702	911	335	5	Tidak
KABUPATEN PATI	1.042	795	445	4	Tidak
KABUPATEN PEKALONGAN	1.776	869	319	6	Tidak
KABUPATEN PEMALANG	6.390	1.150	564	28	Tidak
KABUPATEN PURBALINGGA	1.837	1.188	755	7	Tidak
KABUPATEN PURWOREJO	10.445	1.753	658	13	Tidak
KABUPATEN REMBANG	1.741	1.189	343	5	Tidak
KABUPATEN SEMARANG	7.831	1.857	462	1	Tidak
KABUPATEN SRAGEN	18.077	1.356	324	49	Tidak
KABUPATEN SUKOHARJO	2.920	1.115	392	3	Tidak
KABUPATEN TEGAL	7.078	1.417	334	-	Tidak
KABUPATEN TEMANGGUNG	1.497	1.215	515	5	Tidak
KABUPATEN WONOGIRI	2.020	1.404	747	9	Tidak
KABUPATEN WONOSOBO	7.643	729	308	3	Tidak
KOTA MAGELANG	2.090	444	229	-	Tidak
KOTA PEKALONGAN	2.187	808	328	1	Tidak
KOTA SALATIGA	662	624	286	-	Tidak
KOTA SURAKARTA	2.540	1.117	599	37	Tidak
KOTA TEGAL	3.297	782	266	2	Tidak

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Data Populasi Eksternal 2022 DIY

Survei Penilaian Integritas

WILAYAH	N DATA POPULASI	N DATA CLEAN	PEROLEHAN		CAPI
			ELIGIBLE	NON-ELIGIBLE	
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	3.068	2.498	294	19	Tidak
KOTA YOGYAKARTA	9.928	3.278	814	87	Tidak
KABUPATEN BANTUL	3.382	1.430	373	54	Tidak
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	14.013	5.878	518	40	Tidak
KABUPATEN KULON PROGO	17.820	4.726	526	63	Tidak
KABUPATEN SLEMAN	40.223	5.256	731	52	Tidak

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Data Populasi Eksternal 2022 Jawa Tengah

Survei Penilaian Integritas

WILAYAH	N DATA POPULASI	N DATA CLEAN	PEROLEHAN		CAPI
			ELIGIBLE	NON-ELIGIBLE	
PROVINSI JAWA TENGAH	2.341	1.656	378	32	Tidak
KOTA SEMARANG	26.267	16.102	960	110	Tidak
KABUPATEN BANJARNEGARA	2.391	1.176	132	20	Tidak
KABUPATEN BANYUMAS	21.880	4.663	519	41	Tidak
KABUPATEN BATANG	300	259	230	-	183
KABUPATEN BLORA	104.547	1.583	207	23	Tidak
KABUPATEN BOYOLALI	1.214	1.062	257	41	Tidak
KABUPATEN BREBES	2.591	1.652	241	38	Tidak
KABUPATEN CILACAP	1.367	786	137	9	Tidak
KABUPATEN DEMAK	24.768	7.069	559	78	Tidak
KABUPATEN GROBOGAN	8.601	5.726	621	92	Tidak
KABUPATEN JEPARA	2.645	1.974	401	19	Tidak
KABUPATEN KARANGANYAR	4.915	3.286	353	41	Tidak
KABUPATEN KEBUMEN	4.181	2.700	250	52	Tidak
KABUPATEN KENDAL	26.941	7.986	485	106	Tidak
KABUPATEN KLATEN	18.984	6.843	605	54	Tidak
KABUPATEN KUDUS	46.306	8.418	549	59	Tidak
KABUPATEN MAGELANG	3.481	1.903	357	18	Tidak
KABUPATEN PATI	3.494	1.587	238	30	Tidak
KABUPATEN PEKALONGAN	11.649	4.320	471	63	Tidak
KABUPATEN PEMALANG	6.012	4.823	467	111	Tidak
KABUPATEN PURBALINGGA	21.498	3.678	360	75	Tidak
KABUPATEN PURWOREJO	21.238	4.473	496	59	Tidak
KABUPATEN REMBANG	58.706	2.163	173	30	Tidak
KABUPATEN SEMARANG	195.570	6.682	558	105	Tidak
KABUPATEN SRAGEN	9.096	2.985	467	60	Tidak
KABUPATEN SUKOHARJO	5.116	3.474	449	74	Tidak
KABUPATEN TEGAL	1.666	1.007	171	8	Tidak
KABUPATEN TEMANGGUNG	53.896	31.102	469	223	Tidak
KABUPATEN WONOGIRI	16.640	5.812	461	41	Tidak
KABUPATEN WONOSOBO	5.320	3.473	420	54	Tidak
KOTA MAGELANG	2.432	2.100	536	57	Tidak
KOTA PEKALONGAN	4.638	3.114	462	60	Tidak
KOTA SALATIGA	4.798	4.132	364	97	Tidak
KOTA SURAKARTA	3.980	1.115	335	44	Tidak
KOTA TEGAL	1.652	868	87	17	Tidak

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Data Populasi Eksper 2022 DIY

Survei Penilaian Integritas

WILAYAH	N DATA POPULASI	N DATA CLEAN	PEROLEHAN		CAPI
			ELIGIBLE	NON-ELIGIBLE	
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	11	11	11	-	Tidak
KOTA YOGYAKARTA	22	18	17	-	Tidak
KABUPATEN BANTUL	134	95	19	-	Tidak
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	37	36	16	-	Tidak
KABUPATEN KULON PROGO	11	11	11	-	Tidak
KABUPATEN SLEMAN	13	13	13	-	Tidak

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Data Populasi Eksper 2022 Jawa Tengah

Survei Penilaian Integritas

WILAYAH	N DATA POPULASI	N DATA CLEAN	PEROLEHAN		CAPI
			ELIGIBLE	NON-ELIGIBLE	
PROVINSI JAWA TENGAH	18	18	18	-	Tidak
KOTA SEMARANG	20	20	20	-	Tidak
KABUPATEN BANJARNEGARA	17	17	17	-	Tidak
KABUPATEN BANYUMAS	57	45	15	-	Tidak
KABUPATEN BATANG	19	19	19	-	Tidak
KABUPATEN BLORA	13	13	10	-	Tidak
KABUPATEN BOYOLALI	15	15	15	-	Tidak
KABUPATEN BREBES	17	17	17	-	Tidak
KABUPATEN CILACAP	14	14	13	-	Tidak
KABUPATEN DEMAK	12	11	11	-	Tidak
KABUPATEN GROBOGAN	17	17	15	-	Tidak
KABUPATEN JEPARA	14	10	10	-	Tidak
KABUPATEN KARANGANYAR	58	25	16	-	Tidak
KABUPATEN KEBUMEN	11	11	11	-	Tidak
KABUPATEN KENDAL	24	24	13	-	Tidak
KABUPATEN KLATEN	17	17	17	-	Tidak
KABUPATEN KUDUS	75	71	14	-	Tidak
KABUPATEN MAGELANG	17	12	11	-	Tidak
KABUPATEN PATI	16	16	16	-	Tidak
KABUPATEN PEKALONGAN	24	22	14	-	Tidak
KABUPATEN PEMALANG	43	42	13	-	Tidak
KABUPATEN PURBALINGGA	14	14	14	-	Tidak
KABUPATEN PURWOREJO	81	41	13	-	Tidak
KABUPATEN REMBANG	21	21	21	-	Tidak
KABUPATEN SEMARANG	53	34	15	-	Tidak
KABUPATEN SRAGEN	14	10	10	-	Tidak
KABUPATEN SUKOHARJO	13	13	13	-	Tidak
KABUPATEN TEGAL	23	18	18	-	Tidak
KABUPATEN TEMANGGUNG	15	15	15	-	Tidak
KABUPATEN WONOGIRI	26	26	19	-	Tidak
KABUPATEN WONOSOBO	13	13	13	-	Tidak
KOTA MAGELANG	96	78	21	-	Tidak
KOTA PEKALONGAN	23	23	22	-	Tidak
KOTA SALATIGA	23	23	20	-	Tidak
KOTA SURAKARTA	29	22	16	-	Tidak
KOTA TEGAL	25	25	14	-	Tidak

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

255.964
JUMLAH RESPONDEN 2021

392.785
JUMLAH RESPONDEN 2022

400.000
TARGET RESPONDEN 2023

222.470
INTERNAL 2022

Pegawai ASN maupun Non ASN

162.155
EKSTERNAL 2022

Masyarakat umum pengguna layanan dan vendor pengadaan

8.160
EKSPER 2022

Narasumber ahli dari BPK, BPKP, Ombudsman, LSM, Jurnalis, dll

Keterangan :
Dari 407.108 data responden yang masuk. 14.323 jawaban responden tidak dianalisis karena distribusi jawaban abnormal yang tersebar di 120 K/L/PD dan 29.987 responden tidak *eligible*.

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

RESPONDEN INTERNAL

INTERNAL

Pegawai ASN maupun Non ASN

Pegawai (ASN dan Non-ASN) seluruh OPD induk dengan kriteria:

- Masa kerja **melebihi 1 tahun** pada unit kerja tersebut
- Melakukan **pekerjaan/tusi utama**
- Tidak termasuk driver, satpam, resepsionis, cleaning service

Template Internal : https://bit.ly/INTERNALSPIPEMDA

No.	Unit Kerja	Eselon I	Nama Pegawai	Tanggal Mulai Bekerja di Unit Kerja	Jabatan	No. HP (Aktif)	Email Aktif

Template tercantum pada : Lampiran Penjelasan lanjutan terkait SPI 2023_Pemda

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

RESPONDEN EKSTERNAL

EKSTERNAL

Masyarakat umum pengguna layanan dan vendor pengadaan

Responden eksternal hanya diambil **dari OPD yang memberikan layanan publik** dengan kriteria:

- Pengguna layanan yang menerima layanan setahun terakhir **periode Juni 2022 – Mei 2023.**
- Pengguna layanan yang mengurus layanan dari awal hingga akhir

Template Eksternal: https://bit.ly/EKSTERNALSPIPEMDA

No.	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan yang Diterima	Tanggal/ Bulan/ Tahun Mengurus Layanan	Nama Pengguna Layanan	No. HP (Aktif)	Email Aktif

Template tercantum pada : Lampiran Penjelasan lanjutan terkait SPI 2023_Pemda

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

RESPONDEN EKSPER

EKSPER

Narasumber ahli dari BPK, BPKP, Ombudsman, LSM, Jurnalis, dll

13 kriteria eksper.

Eksper merupakan kalangan ahli/stakeholder yang dapat memberikan penilaian instansi, **berhubungan dengan instansi dalam 1 tahun terakhir.**

Template Eksper/ Stakeholder : https://bit.ly/EKSPERSPIPEMDA

No.	Kriteria Ahli	Nama Narasumber Ahli	Jabatan Terakhir	No. HP (Aktif)	Email Aktif
1	Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk Kabupaten/Kota)				
2	Auditor BPK				
3	Auditor BPKP				
4	Perwakilan Ombudsman				
5	Asosiasi pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh				
6	DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A))				
7	Advokat				
8	Saber Pungli Kepolisian (Polres untuk Kab/Kota, Polda untuk Provinsi)				
9	Saber Pungli Kejaksaan (Kejari untuk Kab/Kota, Kejati untuk Provinsi)				
10	Saber Pungli Pengadilan (PN untuk Kab/Kota, PT untuk Provinsi)				
11	Jurnalis/ Wartawan media lokal terbesar				
12	Advisor dari Lembaga Donor yang bekerjasama dengan Pemda				
13	Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ NGO antikorupsi terbesar yang bekerjasama dengan Pemda				

Template tercantum pada : Lampiran Penjelasan lanjutan terkait SPI 2023_Pemda

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

METODOLOGI SURVEI

- ✓ **Probability Sampling**
- ✓ **Unit Kerja Ditentukan (Multistage Random Sampling)**
- ✓ **Pemilihan Responden Acak (Proportional Random Sampling)**
- ✓ **Mitigasi Risiko Korupsi Per Satker**
- ✓ **Pengecekan Data Satker dengan Data BKN**
- ✓ **Kuesioner Diisi Secara Daring**

Metode Blasting (Online Survei – Self Administerred)

Survei Penilaian Integritas

Whatsapp Blast

Dengan CHECKLIST HIJAU dan label FRONTIER

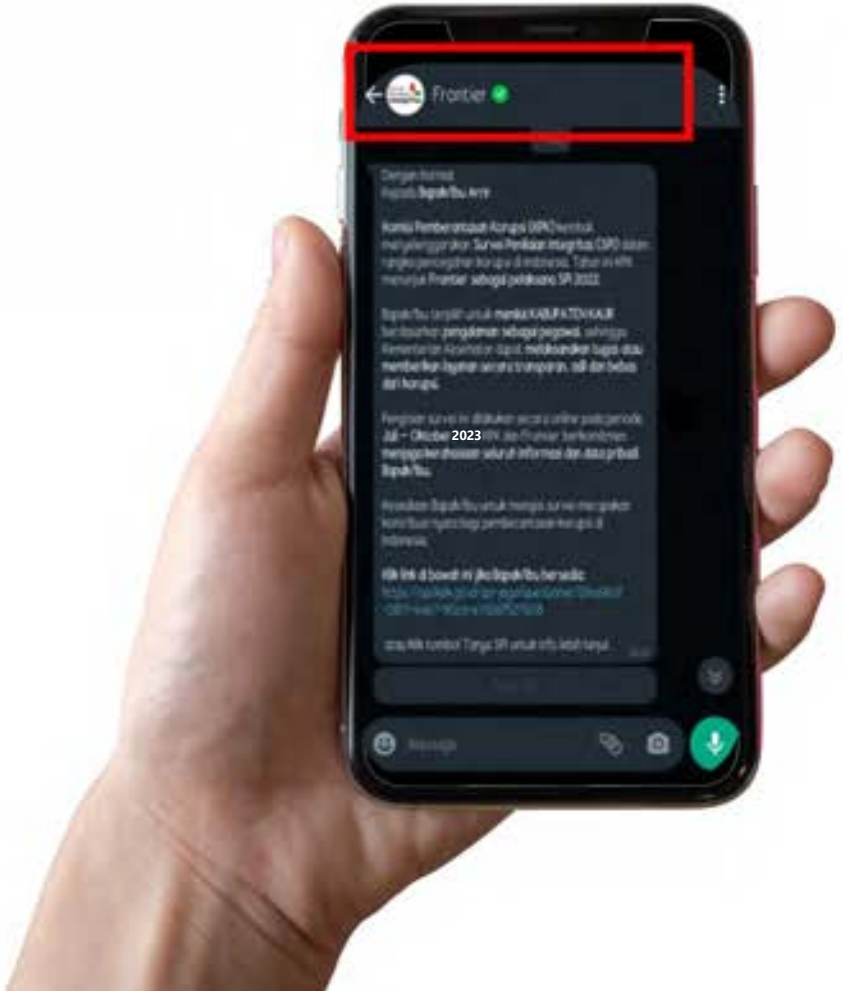

Email Blast

Pengisian SPI 2023 melalui platform Q7

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Penggunaan QR Code

Survei Penilaian Integritas

4 Bulan **Maret-Juni**

QR Code dilakukan hanya untuk
PENDAFTARAN RESPONDEN

Pendaftaran Data Diri :

- Nama
- Nomor HP
- Email
- Unit Layanan
- Jenis Layanan
- Tanggal Layanan

QR Code dikhususkan untuk responden eksternal

QR Code diletakkan pada loket-loket layanan ke publik

4 Bulan **Juli-Oktober**

QR Code dilakukan hanya untuk
PENGISIAN SURVEI

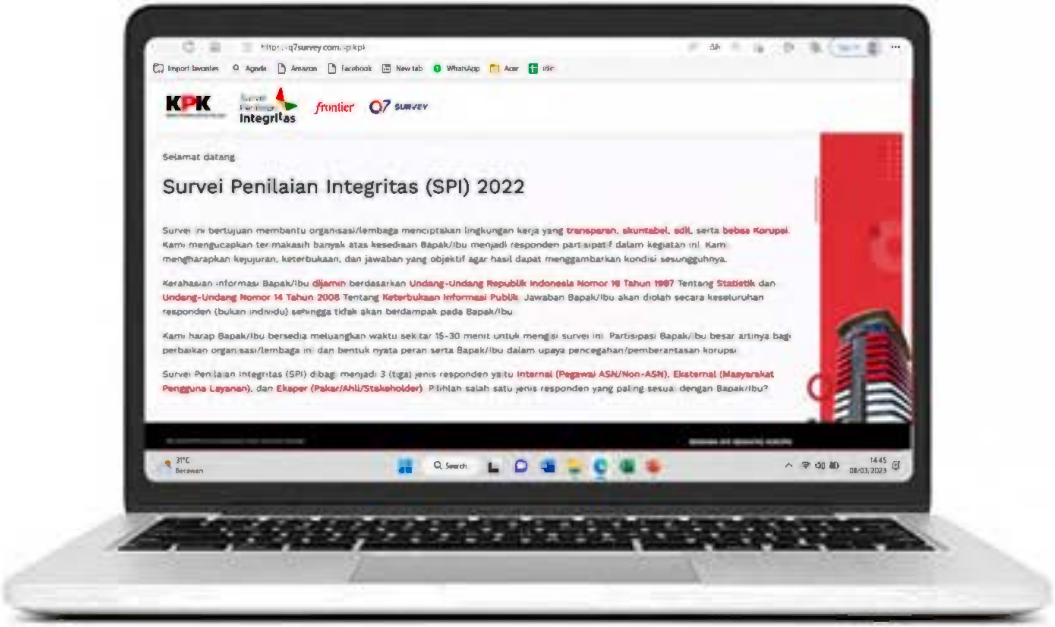

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Penggunaan QR Code

Survei Penilaian Integritas

4 Bulan **Maret-Juni**

QR Code dilakukan hanya untuk
PENDAFTARAN RESPONDEN

Pendaftaran Data Diri :

- Nama
- Nomor HP
- Email
- Unit Layanan
- Jenis Layanan
- Tanggal Layanan

QR Code dikhususkan untuk responden eksternal

QR Code diletakkan pada loket-loket layanan ke publik

Survei Penilaian Integritas
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
PENDAFTARAN SPI 2023

https://bit.ly/QR_PendaftaranSPI2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023

Survei Penilaian Integritas

TIMEPLAN SPI 2023

1 BULAN	2 BULAN	4 BULAN	2 BULAN
APRIL	MEI-JUNI	JULI-OKTOBER	NOVEMBER-DESEMBER
• Penyampaian kepada KPK komitmen instansi sebagai peserta SPI tahun 2023 • Penyampaian Matrix Tindak Lanjut • Sosialisasi SPI 2023	• Persiapan Pelaksanaan dan Pengumpulan Data Populasi : ✓ Pegawai ✓ Pengguna Layanan ✓ Eksper	• Pencacahan secara daring • Pengambilan data primer : menghubungi pegawai, eksternal pengguna layanan, dan eksper untuk mengisi kuesioner daring	• Pengolahan Data • Analisis • Pembuatan Laporan • Diseminasi Hasil SPI 2023
Persiapan Survei	Pengumpulan Data Populasi	Pelaksanaan Survei	Pengolahan Data & Pelaporan

TERIMA KASIH!

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

https://www. kpk.co.id/
https://aclc.kpk.go.id/
https://jaga.id

Call Center KPK : 198

Follow us:

@official.kpk

Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav.4 Jakarta Selatan 12950

All Rights Reserved. The information in this document is confidential and intended only for KPK. COPYRIGHT© 2023